

FORM - REGISTER RISIKO & RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MITIGAS

UNIT ORGANISASI : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi
Tahun : 2021

[illegible]

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	49.639.748.058																
	Sub Kegiatan																	
	a. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.579.748.058	3	kuualitas data masih belum maksimal	KABID PFM	3	Lemahnya Koordinasi dan sosialisasi terkait pengelolaan data Fakir Miskin		Pergub 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, dukcapil Provinsi Jambi	4	4	15	Tinggi		pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas pendampingan dan pemberdayaan melalui sosialisasi untuk wilayah yang terjangkau maupun	KABID PFM	TRIWULAN I S/D IV	
	b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	60.000.000	3	kemungkinan resiko sosial yang lebih besar lagi	KABID PFM	3	minimnya bantuan yang menyasar langsung ke masyarakat Kelompok Miskin		Pergub No. 25 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial dan Hibah	4	4	15	tinggi		Penambahan Fasilitasi Bantuan Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin	KABID PFM	TRIWULAN IV	
F	Program :																	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	270.636.055																
	Kegiatan :																	
	1.	270.636.055	1	Belum Semua terjangkau	Kabid	1	jumlah petugas kurang	C	1. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU RI No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	3	4	12	SEDANG	1	menambah petugas lapangan	Kabid	triwulan IV	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi																	
	Sub Kegiatan																	
	a. Penyediaan Permakanan	102.148.200																
	b. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.975.920																
	c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	59.999.935																
	d. Pelayanan Dukungan Psikososial	69.512.000																
G	Program :																	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	151.102.190																
	Kegiatan :																	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	151.102.190																
	Sub Kegiatan																	
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	76.107.532																
	b. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	74.994.658																
H	Program :																	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	491.683.200																
	Kegiatan :																	
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	491.683.200																
	Sub Kegiatan																	
	a. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	199.868.590	1	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselarskan dengan aturan	Bidang Dukcapil	1	Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ditemui dalam administrasi kependudukan	1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	3	3	3	rendah		Identifikasi dan mencari solusi terhadap segala sesuatu yang berimplikasi terhadap kebijakan teknis	Bidang Dukcapil		
	b. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	93.755.400	1	Sulitnya melaksanakan pendataan Penduduk non permanen yang disebabkan penduduk tsb tidak melaporkan identitasnya dan Penduduk rentan yang disebabkan penduduk sulit untuk didata terkait tempat tinggal/ berpindah-pindah	Bidang Dukcapil	1	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian peristiwa kependudukan yang dialami	1	Permendagri Nomor 96 Tahun 2019. Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	4	3	3	rendah		Identifikasi dan melaksanakan pemetaan terhadap Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota sehingga didapat solusi dari permasalahan	Bidang Dukcapil		

	c. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	149.994.310	1	Belum maksimalnya pelaksanaan pendaftaran penduduk karena banyak kegiatan yang terlaksana tidak sesuai dengan kebutuhan	Bidang Dukcapil	1	Belum maksimalnya tata kelola pendaftaran penduduk oleh Provinsi terkait kelembagaan Dinas Dukcapil yang masih bergabung		1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	3	3	3	rendah	Identifikasi segala permasalahan yang ditimbulkan dari tata kelola pendaftaran penduduk sehingga didapat strategi terbaik dalam pelaksanaannya	Bidang Dukcapil	
	d. Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	48.064.900	1	Implementasi pelaksanaan pemanfaatan data yang belum maksimal	Bidang Dukcapil	1	Kurangnya pemahaman pengguna/OPD dalam memanfaatkan database kependudukan khususnya pendaftaran penduduk		1	Permendagri Nomor 102 Tahun 2019. Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan	3	3	3	rendah	Identifikasi permasalahan yang menyebabkan kurangnya penerapan pemanfaatan data sehingga dapat meningkatkan target kinerja	Bidang Dukcapil	
I	Program :	425.292.581															
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																
	Kegiatan :																
	Pelayanan Pencatatan Sipil	425.292.581															
	Sub Kegiatan																
	a. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	206.922.160	2	Penerapan kebijakan yang sulit diterapkan di daerah yang rawan konflik	Bidang Dukcapil	2	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Kebijakan Teknis Pencatatan Sipil		2	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	4	3	3	Rendah	Identifikasi Permasalahan dan Pembinaan	Bidang Dukcapil	Triwulan III s/d IV
	b. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	0															
	c. Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	53.126.000	2	Pemanfaatan data yg rentan penyalahgunaan oleh pihak terkait	Bidang Dukcapil	2	Kurangnya kesadaran OPD pengguna dalam pentingnya pemanfaatan dan perlindungan data penduduk		2	Permendagri Nomor 102 Tahun 2019. Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan	4	3	3	Rendah	Identifikasi Permasalahan dan Pembinaan	Bidang Dukcapil	Triwulan III s/d IV
	d. Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	165.244.421	2	Masih terbatasnya fasilitas pendukung di daerah guna peningkatan pelayanan Dukcapil	Bidang Dukcapil	2	kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam mensupport pelayanan Adminduk di daerah		2	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	4	3	3	Rendah	Identifikasi Permasalahan dan Pembinaan	Bidang Dukcapil	Triwulan III s/d IV
J	Program :	858.513.489															
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
	1. Kegiatan :	84.654.820															
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Perekaman KTP-el belum mencapai target nasional 100% dan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi		masyarakat untuk melaksanakan perekaman KTP-el, Kurang memadainya peralatan rekam dan cetak KTP-el, Terhambatnya jaringan	U		tentang kebijakan administrasi kependudukan dan Melaksanakan pelayanan melalui berbagai inovasi,	2	2	4	ADA			
	Sub Kegiatan																
	a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.244.820		kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tidak terlaksana dengan baik	Kepala Bidang Dukcapil		Tidak adanya pedoman untuk pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kegiatan			Membuat perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di setiap pelaksanaan kegiatan	3	2	6	tinggi	Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pada setiap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kepala Bidang Dukcapil	Triwulan I s.d. IV
	b. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/kota	14.410.000		Tidak terkelolanya data kependudukan dengan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota	Kepala Bidang Dukcapil		Tidak melaksanakan sesuai regulasi			Permendagri No. 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	3	4	12	Sangat tinggi	Melaksanakan pengawasan dan check and recheck terhadap penyusunan data penduduk provinsi serta kabupaten/kota	Kepala Bidang Dukcapil	Akhir semester I dan II
	2. Kegiatan :	285.612.400															
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																
	Sub Kegiatan																
	a. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	78.124.800		Terhambatnya pelaksanaan PIK di Kabupaten/kota	Kepala Bidang Dukcapil		Lambatnya respon dari Dukcapil Provinsi terhadap Kabupaten/kota			PP No. 40 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	2	2	4	rendah	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap	Kepala Bidang	Triwulan I s.d. IV
	b. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.340.000		Masyarakat tidak mengetahui informasi	Kepala Dinas Sosial Dukcapil		Tidak menyampaikan informasi atau perubahan kebijakan terkait			PP No. 40 Tahun 2019	2	2	4	rendah	Responsif apabila ada perubahan regulasi yang	Kepala Dinas	Triwulan I s.d. IV
	c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	44.365.000		Pemangku kepentingan tidak memahami tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Sosial Dukcapil		Kurang adanya komunikasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan			PP No. 40 Tahun 2019	2	2	4	rendah	Menjalin hubungan kerja sama yang baik kepada pemangku kepentingan	Kepala Dinas Sosial Dukcapil	Triwulan I s.d. IV

d.	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	660.000		Tugas dan Fungsi Administrasi Kependudukan di	Kepala Bidang Dukcapil	Kurang adanya koordinasi kepada lembaga pemerintah lingkup provinsi		PP No. 40 Tahun 2019	2	2	4	rendah		Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama yang baik	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I s.d. IV
e.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	74.792.100		Tidak terlaksananya hak akses dan	Kepala Dinas Sosial Dukcapil	Kurangnya pemahaman OPD lingkup Provinsi tentang		Permendagri No. 102 Tahun 2019	3	4	12	Sangat tinggi		Melaksanakan sosialisasi kepada OPD dan	Kepala Dinas	Triwulan I s.d. IV
f.	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	0														
g.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.330.500		pelaksanaan terkait pengelolaan informasi administrasi	Kepala Bidang Dukcapil	Kurangnya informasi, arahan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam		Membuka layanan konsultasi dan pengaduan di Bidang Dukcapil	2	2	4	rendah		Menerima dengan baik apabila ada pihak-pihak yang berkonsultasi membutuhkan	Kepala Bidang Dukcapil	Triwulan I s.d. IV
3.	Kegiatan :															
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	488.246.269														
	Sub Kegiatan															
a.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	469.983.269		Pelaksanaan PIAK di kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepala Bidang Dukcapil	Kurang adanya pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/kota		PP No. 40 Tahun 2019				tinggi		Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intensif ke Kabupaten/Kota, dan berkoordinasi serta konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten/kota	Kepala Bidang Dukcapil	Triwulan I s.d. IV
b.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	18.263.000		tidak terlaksananya bimbingan teknis	Kepala Bidang Dukcapil	tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan bimtek		Melaksanakan perencanaan anggaran dan kegiatan secara lebih baik	2	2	4	rendah		materi bimtek dimasukkan ke dalam kegiatan bimtek lainnya	Kepala Bidang Dukcapil	Triwulan IV
K.	Program :															
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.970.000														
	Kegiatan :															
	Penyediaan Profil Kependudukan	3.970.000														
	Sub Kegiatan															
a.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	3.445.000		Tidak tersedianya data kependudukan skala	Kepala Bidang Dukcapil	Kurangnya dukungan anggaran dan terbatasnya		Melaksanakan perencanaan anggaran	2	3	6	tinggi		Mengolah data kependudukan dengan	Kepala Bidang	Semester I dan II
b.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	525.000		Tidak tersusunnya Profil Data Kependudukan skala	Kepala Bidang Dukcapil	Kurangnya dukungan anggaran dan terbatasnya SDM untuk menyusun buku		Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan	2	3	6	tinggi		Mengolah data dan menyusun buku Profil berdasarkan data	Kepala Bidang Dukcapil	Semester I
L.	Program :															
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.497.969.512														
	1. Kegiatan :															
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.497.969.512													Kepala UPTD	
	Kegiatan :															
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten								
a																
b	Sub Kegiatan															
c	Penyediaan Permakanan	709.560.000														
d	Penyediaan Sandang	137.471.944														
e	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	513.976.041														
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	9.219.958														
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	15.744.552		Penerima manfaat yang kurang sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial	UPTD PSTW "BUDI LUHUR"	Ada penerima mafaat yang tidak mau mengikuti kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritua dan sosial			2	2	4	Rendah				
h	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	64.780.552		Penerima manfaat kurang kebersihan diri	UPTD PSTW "BUDI LUHUR"	Petugas kesehatan harus lebih ekstra perhatian kepada penerima manfaat			3	4	12	Sangat Tinggi				

[illegible]

h	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.032.000		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
i	Pemulangan ke Daerah Asal	22.692.000		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
4	Kegiatan :																		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sub Kegiatan	2.278.603.733		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*				Permensos nomor 9 Tahun 2018 Tentang SPM									Kepala UPTD		
a	Penyediaan Permakanan	1.252.395.000		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
b	Penyediaan Sandang	104.483.995		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
c	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	420.960.000		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
d	Penyediaan Alat Bantu	127.774.100		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	28.342.700		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	81.993.060		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
g	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	182.651.978		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
h	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	34.973.900		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															
i	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	45.029.000		UPTD PSBAWEP * Harapan Mulya*															

Jambi, 2022
 KEPALA DINAS
 SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI JAMBI,

ARIEF MUNANDAR SE
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19670307 199903 1 004

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
- 5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- 6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
- 7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
- 8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
- 9 Kolom 9 Diisi Pengendalian yang sudah ada
- 10 Kolom 10 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
- 11 Kolom 11 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan

Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Tidak signifikan/sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak

Skala Probabilitas Risiko

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat signifikan/hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 51-)
Kemungkinan besar/sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (lebih dari 51-)
Kadang-kadang/mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (lebih dari 51-)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (lebih dari 51-)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sering (lebih dari 0-10%)

Kriteria Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
≥12 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik